

# **Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional Di Kantor Pertanahan Kota Manado**

Meryansi Sappe Ruruk.  
Alden Laloma  
Jericho D.Pombengi

*ABSTRACT : Information System Management of the National Land policy issued by the government to help communities in the rapid completion of the maintenance of land given the land is something lasting and useful for humans. Implementation of the policy of the National Land Management Information System is still not going well, so this research to answer the question of how the policy implementation of the National Land Management Information System. In this study, the researchers limited the Model Policy of Edward III, communications, resources and attitude.and researchers also see from the quality factor of services that exist in the land office Manado. This study uses descriptive qualitatively approach through in-depth interviews to 10 informants, observation and search for additional documents in the form of a list of guidelines for the interview, a tape recorder and stationery. The results showed that the overall implementation of the national land management information system has not done well.*

*Keywords: Policy Land Management Information System (SIMTANAS) Communication, Resources, attitude and quality of service.*

## **PENDAHULUAN**

Kondisi pelayanan publik telah mengalami perubahan sejalan bergulirnya arus reformasi. Terjadinya reformasi di bidang politik dan hukum telah melahirkan perubahan yang cepat pada tatanan kehidupan dan perilaku masyarakat maupun perilaku aparatur pemerintah. Dunia semakin di tuntut untuk menggunakan alat canggih dalam melakukan segala sesuatu dalam hal ini penggunaan komputer sangat berperan penting untuk membuat segala urusan mudah dan cepat khususnya dalam pelayanan di bidang pertanahan. Banyak

upaya di lakukan pemerintah untuk membuat pelayanan publik lebih efektif dalam mengurus segala sesuatu berkaitan dengan pertanahan. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan SIMTANAS. Dari pelayanan yang manual sekarang pemerintah memanfaatkan Sistem Informasi dan Manajemen untuk mengelolah sumber daya tanah secara utuh melalui Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional . Pada pasal 1 huruf b Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang kebijaksanaan Pertanahan Nasional,Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengemban tugas sebagai pelaksana untuk membangun dan mengembangkan

SIMTANAS. Salah satunya meliputi penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran Tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan kepemilikan tanah yang di hubungkan dengan *e-government, e-commerce, dan e-payment*. Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu sistem elektronik adalah penggunaan sistem komputer secara luas yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta data elektronik. Sistem ini adalah suatu sistem yang terpadu antara manusia dan mesin yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, prosedur standar, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang mencakup fungsi input, proses, output, penyimpanan dan komunikasi. Pengelolaan data pertanahan dengan menggunakan teknologi informasi merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan hal ini berkaitan dengan karakteristik data pertanahan itu sendiri yang bersifat multidimensi yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan dan sosial budaya. Pengelolaan data pertanahan itu sendiri harus terintegrasi suatu Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang mengalirkan informasi antar seluruh unit organisasi baik di tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan. Disamping sifat data pertanahan tersebut, juga pengelolaan

pertanahan secara elektronik ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat untuk mewujudkan *good governance* yang akhirnya akan berkaitan keterbukaan informasi untuk masyarakat dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, sebenarnya telah tersedia 6 (enam) jenis peraturan, Undang-undang ITE disahkan tahun 2008, yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mendukung pembangunan database pertanahan nasional. Keenam peraturan tersebut adalah:

- a) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- c) Perpres 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional pasal 3 Huruf r pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pusat Data dan Informasi Pertanahan (PUSDATIN).
- d) Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan

pada Ayat 1 huruf b, menugaskan Badan Pertanahan Nasional untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS).

- e) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomer 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan mengenai media penyimpanan dan tatacara penyimpanan data dan dokumen pertanahan.
- f) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Manado adalah salah satu kantor pertanahan yang telah menerapkan komputersasi sistem informasi manajemen untuk pelayanan pertanahan. Dalam suatu organisasi komunikasi adalah bagian terpenting dalam berjalannya suatu organisasi. demikian juga sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia dan sumber daya finansial yaitu sarana prasarana untuk mendukung lancarnya komunikasi di gunakan sumber daya manusia yang kompeten, cerdas dan

ahli dalam menggunakan sarana prasarana untuk mendukung jalannya suatu organisasi. Dengan demikian keahlian tidaklah cukup, di perlukan sikap dari sumber daya manusia untuk menjalankan kebijakan yang telah di tentukan dalam suatu organisasi dalam hal ini sikap yang harus dimiliki adalah kejujuran dalam memberikan pelayanan yang dan, berpegang pada pedoman yang ada dalam organisasi tersebut.

Adapun kondisi riil di Kantor Pertanahan Kota Manado adalah kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat setelah diterapkannya Kebijakan sistem informasi dan manajemen, masih tetap seperti sebelum diterapkannya kebijakan sistem informasi manajemen pertanahan di lihat dari masalah yang ada yaitu dari aspek komunikasi masih ada pegawai yang belum memahami tentang kebijakan sistem informasi manajemen pertanahan nasional ini karena sosialisasi tentang kebijakan sistem informasi manajemen pertanahan nasional hanya di sampaiakn sebatas materi tidak melalui pembinaan langsung kepada pegawai sehingga masih ada yang kurang memahami. Kemudian di lihat dari aspek sumber daya, sumber daya yang ada di kantor pertanahan kota manado memiliki kemampuan dalam mengelolah fasilitas yang mendukung kebijakan ini namun kendala yang ada yaitu terbatasnya sarana

prasarana yaitu komputer yang di sediakan di kantor pertanahan kota manado mengingat komputer adalah unsur yang paling berpengaruh dalam melaksanakan kebijakan sistem informasi manajemen pertanahan nasional tersebut. Dan berdasarkan sikap yaitu Sikap atau disposisi aparat pelaksana / implementor .dapat di lihat dari Penerimaan dan penolakan pegawai atas Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional di kantor pertanahan Kota Manado dan sikap karyawan dalam memberkan pelayanan kepada masyarakat selaku penerima pelayanan. Kemudian di lihat dari aspek kualitas pelayanan yaitu masih lambatnya proses penyelesaian tugas di karenakan kurangnya sarana prasarana yang di gunakan dalam memberikan pelayanan dan untuk memproses data yang ada.

Dengan adanya masalah tersebut maka peneliti tergerak untuk mengadakan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Manado “.

Pengertian pelaksanaan kebijakan, dikemukakan oleh Syukur Abdullah (1987: 10), adalah :  
“Suatu rangkaian tindak lanjut, setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategi

maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program ataupun kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula”.

Easton (Islamy, 2001:19) bahwa kebijakan mengandung nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaanya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi. Menurut KBBI kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan,kepemimpinan serta cara bertindak (tentang perintah,organisasi dan sebagainya.)

Keberadaan sistem informasi sangat penting untuk mendukung para pemakai dalam melaksanakan tugasnya. Pada sebagian besar organisasi, pusat informasi secara fisik memberikan fasilitas pada para pemakai (user) agar dapat mengakses hardware dan software, meminta dukungan pengembangan aplikasi dan memperoleh pelatihan.

Menurut Azhar Susanto (2004:68) sistem informasi manajemen adalah merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain

dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengelolah data menjadi informasi yang di perlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya.

Menurut Barry E. Cushing dalam Jogiyanto (2005:14) sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan pengendalian.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipatif dari peneliti sehingga di ungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakanginya. Bogda dan Taylor (1975, dalam Lexy J. Moleong, 2007:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian adalah Badan Pertanahan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bahan

pertimbangannya adalah Badan Pertanahan telah menerapkan SIMTANAS untuk menunjang pelayanan pertanahan dan belum pernah di lakukan penelitian tentang penerapannya.

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Mengingat metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka peneliti erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi tujuan informan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informai sebanyak-banyaknya untuk menunjang penelitian ini. Mengingat masalah yang ingin di teliti yaitu kualitas pelayanan dan peneliti juga membatasi dari mode Edward III adalah komunikasi, ,sumber daya(sumber daya manusia dan sarana prasarana) sikap. Maka sifat informan yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah menggunakan insial dari informan yang telah di wawancarai.

Setelah dalam proses pengumpulan data dari Sepuluh (10) informan yang terdiri dari 3 orang pejabat kantor dan 3 orang pegawai/karyawan dan 4 orang masyarakat, dengan tidak lagi ditemukan variasi informasi (mencapai titik jenuh), maka peneliti tidak mencari informasi baru, proses pengumpulan informasi dianggap selesai (telah cukup). Dengan demikian penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi juga bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan

informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah Implementasi kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan di liha dari masalah yang akan di teliti yaitu berkaitan dengan komunikasi, sumber daya dan sikap implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jenis data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan terlibat langsung dengan objek penelitian maupun melalui pengamatan secara langsung di dalam penerapan SIM untuk pelayanan pertanahan. Data tersebut berupa proses pelayanan pertanahan dengan SIM , kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang telah tersedia dari hasil pengumpulan data instansi terkait dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari pendataan dokumen arsip-arsip, laporan-laporan, catatan-catatan tentang pelayanan pertanahan.

Teknik Pengumpulan Data berupa:

### 1. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini untuk mendapatkan keterangan secara lisan mengenai penerapan SIMTANAS di dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan masyarakat yang menjadi penerima pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Manado.

### 2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan data yang bersumber dari arsip-arsip, catatan-catatan, dan laporan- laporan mengenai pelayanan pertanahan.

### 3. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian terhadap proses penerapan SIMTANAS pada kegiatan pelayanan pertanahan. Dengan pengamatan langsung di lokasi peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri penerapan SIMTANAS.

Untuk mendapatkan jawaban permasalahan dan kesimpulan dari penelitian ini, maka digunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu melakukan pengamatan langsung dan mengadakan wawancara kepada pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan tentang Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANA

S) dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan faktual.

Hasil wawancara tentang pelaksanaan kebijakan sistem informasi manajemen pertanahan nasional di Kantor Pertanahan Kota Manado yang dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: (1) Komunikasi : yaitu masih adanya pegawai yang kurang memahami tentang kebijakan sistem informasi manajemen pertanahan nasional karena sosialisasi tentang kebijakan ini hanya di paparkan secara materi tidak ada pelatihan khusus yang dilakukan agar pegawai lebih memahami kebijakan tersebut. (2) Sumber Daya : bahwa pegawai sudah memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas, namun masih kurangnya sarana prasarana yang mendukung di kantor pertanahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas. (3) Disposisi atau Sikap : Sikap pegawai mendukung adanya Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional dengan cara mematuhi semua peraturan yang mengatur tentang Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional. Mereka juga sudah berusaha menunjukkan sikap baik lewat keramahan dan sopan santun dalam memberikan pelayanan. (4) Kualitas Pelayanan : bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap di terapkannya kebijakan sistem informasi

manajemen dan sebelum di terapkannya kebijakan tersebut karena dengan adanya kebijakan ini seharusnya pelayanan lebih cepat tetapi kenyataannya tetap saja masih lama dalam proses penyelesaian tugas di karenakan sarana yang di gunakan masih belum memadai dalam membuat pelayanan lebih cepat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi : Masih kurangnya pegawai yang memahami tentang kebijakan sistem informasi manajemen pertanahan nasional karena tidak adanya pelatihan khusus saat di adakan sosialisasi tentang kebijakan sistem informasi manajemen pertanahan nasional karena hanya di sampaikan lewat pemaparan materi.
2. Sumber Daya : Pegawai sudah mampu melaksanakan tugasnya dan mengelolah komputer dengan baik namun kendala yang masih ada yaitu masih kurangnya sarana prasarana di bagian komputer dimana sarana ini yang paling berperan penting dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen pertanahan nasional.
3. Disposisi/ Sikap : Sikap pegawai yang ada di Kantor Pertanahan Kota Manado sudah mendukung adanya kebijakan

dengan cara melakukan semua aturan yang ada dan sikap dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kualitas Pelayanan: Pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Manado masih mengalami kendala yaitu masih lambatnya penyelesaian tugas yang ada dan sarana yang di butuhkan dalam mendukung kebijakan sistem informasi manajemen untuk mempercepat pelayanan masih kurang memadai sehingga menyebabkan masih lambatnya penyelesaian tugas.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dapat di sarankan dan beberapa penemuan dalam penelitian ini, maka perlu di kemukakan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi :Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Manado jika dilihat dari aspek komunikasi sudah di laksanakan dengan baik, namun perlu di perhatikan lagi karena masih di temui adanya pegawai yang belum memahami dengan baik kebijakan sistem informasi manajemen pertanahan nasional .
2. Sumber Daya :Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai sudah mampu menggunakan dan mengelolah fasilitas dalam hal ini komputer

yang mendukung kebijakan sistem informasi manajemen pertanahan nasional namun perlu di perhatikan yaitu penambahana sarana yaitu komputer karena masih di temui kurangnya komputer yang ada di Kantor Pertanahan Kota Manado.

3. Sikap :Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Manado jika dilihat dari aspek Sikap dari pegawai perlu di pertahankan agar bisa menghasilkan pelayanan yang lebih baik.

4. Kualitas Pelayanan :Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Manado jika dilihat dari aspek kualitas pelayanan maka perlu di tingkatkan lagi kualitas pelayanan dengan memperhatikan faktor pendukung dalam membuat pelayanan lebih mudah dan cepat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy, Washington. Congressionla Quarterly. Press.*



Islamy, M . Irfan 2004. Prinsip-Prinsip  
Perumusan Kebijakan Negara,  
Bumi Aksara. Jakarta.

Jogiyanto, HM., 2005, Sistem Teknologi  
Informasi. Andi, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi  
Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.  
Remaja Rosdakarya.